



PEMERINTAH KOTA BONTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN
2020**



BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Evaluasi Hasil Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	
2.1 Evaluasi Hasil Renja Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2020	1
BAB III Sasaran dan Prioritas Renja Tahun 2019	
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja BPKAD.....	1
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan	
4.1 Program dan Kegiatan	1
BAB V Penutup	1

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul
Tabel II.1.	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II (dua)
Table 2	DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2020



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa azas dan tujuannya adalah : 1). Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional; 2). Perencanaan Pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan; 3). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara; 4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a). Mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan; b). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah; c). Menjamin keterikatan dan konsisten antar perencanaan, penganggaran, pelaksana, dan pengawasan; d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e). Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dimana dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakannya. Dari kebijakan tersebut maka tersusunnya program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/ kegiatan prioritas, dalam tahun berjalan pelaksanaan renja perlu adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kerangka pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang sehingga perlu adanya perubahan Rencana Kerja (Renja) untuk Tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rancangan Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang sebelumnya dibuat dan telah diselaraskan dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang dan Rancangan Awal RKPD Kota Bontang Tahun 2020. Dokumen tersebut selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan dari hasil forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Bontang Tahun 2020 dan menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020.



Dalam rangka Penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang diselaraskan dengan RPJM Daerah atau RENSTRA Daerah sebagai bahan masukan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) untuk pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBN TA. 2020 pada Musrenbang Tahun 2020.

Berdasarkan azas, tujuan dan tahapan perencanaan pembangunan tersebut diatas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menyusun Renja-OPD Perubahan Tahun anggaran 2020. Penyusunan Renja- OPD Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2020, di samping usulan bidang berdasarkan dengan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Peraturan Walikota Bontang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan pembentukan dan susuna perangkat daerah). Perubahan Renja ini merupakan realisasi dari usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Bontang.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang disusun atas dasar landasan dan sejumlah peraturan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593) ;
13. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Walikota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Perwali Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BPKAD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang 2020 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2020. Dan pada khususnya yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA perubahan, sebagai bahan tersusunnya DPA-P yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang adalah :

1. Sebagai acuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Kota Bontang Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.



2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang selama Tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Hasil Renja OPD, Bab ini memuat informasi evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun berjalan dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Analisis kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Isu – isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Sasaran Dan Prioritas Renja Tahun 2020, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan, yaitu : Telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan, Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan, Bab ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan perencanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Bab V Penutup, Bab ini berisi harapan dan komitmen merealisasikan Renja, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 (Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester 1 Tahun 2020)

Total anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah pada Tahun 2020 adalah :

Belanja Tidak Langsung	:	Rp. 8.017.319.906,00
Belanja Langsung	:	<u>Rp. 12.699.805.100,00</u>
		<u>Rp. 20.717.125.006,00</u>

Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan terdiri dari 7 (Tujuh) program dengan kegiatan yang dilaksanakan berjumlah 47 (Empat Tujuh) kegiatan. Dari 7 (Tujuh) program tersebut 5 (Lima) program merupakan Program rutin OPD dan sisanya 2 (Dua) program merupakan prioritas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Sampai dengan periode **30 Juni 2020** progres capaian realisasi Fisik semester pertama yang telah dicapai sebesar **58,63 %** Sedangkan realisasi Keuangan sebesar Rp. **5.317.433.418,00** atau **41,87%**.(Realisasi Belanja Langsung).

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **3.809.821.680,00** atau **47,53 %**
2. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp **5.317.433.418,00** atau **41,87%**.(dengan capaian kinerja fisik sebesar **58,63 %** dan capaian kinerja keuangan sebesar **41,87%**

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan berhasil kegiatan yang telah terlaksana 100 % adalah sebagai berikut :

Sampai dengan periode **30 Juni 2020** progres **Fisik** yang telah dicapai **58,63 %**. Sedangkan realisasi **Keuangan** per **30 Juni 2020** sebesar **41,87%**

Jumlah Keseluruhan Kegiatan sebanyak 47 Kegiatan yang dilaksanakan dengan capaian sebagai berikut :

1. Capaian Fisik Pekerjaan yang dengan capaian fisik Pekerjaan 100 % sebanyak 6 (Enam) Kegiatan.
2. Capaian fisik Pekerjaan 30 % - 85 % sebanyak 32 (Tiga puluh Dua) Kegiatan.
3. Capaian fisik Pekerjaan 5 % - 18% sebanyak 9 (Sembilan) Kegiatan.



**PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BONTANG TAHUN 2020**

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan berhasil kegiatan yang telah terlaksana 100 % adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Fisik
1.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100
3.	Penyusunan Pergeseran APBD	100
4.	Bimtek Kas Daerah	100
5.	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	100
6.	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	100

Untuk lebih jelasnya Laporan Evaluasi Hasil Renja 2020 Triwulan Kedua dapat dilihat pada Table berikut dibawah ini :

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang
Triwulan I dan II Tahun 2020**

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2017- 2021(Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2017 - 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I,II,III,IV								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		12= 8+9+10+11		13= 6+12		14=13/5x100%								
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
1	Tercapainya tertib administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100%	Rp 28.494.106.988,00	100%	Rp 28.662.799.737,00	100%	Rp 5.373.774.432,00	100%	Rp1.451.906.937,00	100%	Rp 1.758.999.544,00	100%	-	100%	100%	Rp 3.218.908.451,00	Rp 23.873.709.218,00	Rp 27.884.690.699,00				
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	60 Bulan	Rp 33.300.000,00	36 bulan	Rp 19.867.646,00	12 bulan	Rp 8.689.300,00	3 Bln	Rp 1.431.000,00	3 Bln	Rp 3.436.000,00	-	-	-	6 Bln	Rp 4.867.000,00	42 Bulan	Rp 24.734.646,00	8,40	Rp 4.946.929,20	BPKAD	
2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	60 Bulan	Rp 2.537.400.000,00	36 bulan	Rp 1.288.576.321,00	12 bulan	Rp 370.800.000,00	3 Bln	Rp 97.330.889,00	3 Bln	Rp 64.471.538,00	-	-	-	6 Bln	Rp 161.802.427,00	42 Bulan	Rp 1.450.378.748,00	8,40	Rp 290.075.749,60	BPKAD	
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	231 unit	Rp 270.527.500,00	137 Unit	Rp 138.865.640,00	47 unit	Rp 40.792.500,00	15 unit	Rp 3.325.000,00	3 Unit	Rp 61.620,00	-	-	-	20 Unit	Rp 3.386.620,00	157 Unit	Rp 142.252.260,00	31,40	Rp 28.450.452,00	BPKAD	
4		Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	5 Unit	Rp 1.357.380.000,00	5 Unit	Rp 883.128.736,00	5 unit	Rp 369.340.000,00	5 unit gedung dan 26 item peralatan kebersihan	Rp 166.246.190,00	5 unit gedung dan 26 item peralatan kebersihan	Rp 89.838.144,00	-	-	-	5 unit gedung dan 26 item peralatan kebersihan	Rp 256.084.334,00	5 unit gedung dan 26 item peralatan kebersihan	Rp 1.139.213.070,00	100	Rp 227.842.614,00	BPKAD	
5		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	70 item	Rp 1.147.552.050,00	42 item	Rp 1.086.145.950,00	53 item	Rp 201.070.000,00	53 Item	Rp 198.399.190,00	-	Rp -	-	-	-	53 Item	Rp 198.399.190,00	95 Item	Rp 1.284.545.140,00	19,00	Rp 256.909.028,00	BPKAD	
6		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Jenis Penyediaan Pengandaian dan Cetak	15 Jenis	Rp 2.615.533.494,00	3 Jenis	Rp 1.825.059.688,00	3 jenis	Rp 456.064.730,00	2 jenis	Rp 201.933.331,00	1 jenis	Rp 130.752.849,00	-	-	-	3 jenis	Rp 332.686.180,00	6 jenis	Rp 2.157.745.868,00	100,00	Rp 431.549.173,60	BPKAD	
7		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	118 Item	Rp 314.000.000,00	72 item	Rp 270.760.900,00	16 item	Rp 95.556.600,00	16 Item	Rp 93.918.000,00	-	Rp -	-	-	-	16 Item	Rp 93.918.000,00	88 Item	Rp 364.678.900,00	17,60	Rp 72.935.780,00	BPKAD	
8		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	64 Item	Rp 3.135.671.700,00	44 Item	Rp 2.356.031.250,00	9 Item	Rp 740.320.000,00	1 Item	Rp 46.750.000,00	4 Item	Rp 450.081.500,00	-	-	-	5 Item	Rp 496.831.500,00	49 Item	Rp 2.852.862.750,00	980%	Rp 570.572.550,00	BPKAD	
9		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	5 jenis bacaan	Rp 184.673.600,00	5 jenis bacaan	Rp 92.275.600,00	4 jenis bacaan	Rp 35.937.000,00	4 jenis bacaan	Rp 5.134.500,00	4 jenis bacaan	Rp 11.025.000,00	-	-	-	4 jenis bacaan	Rp 16.159.500,00	4 jenis bacaan	Rp 108.435.100,00	100	Rp 21.687.020,00	BPKAD	
10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	50 Item	Rp 520.704.000,00	30 item	Rp 475.683.750,00	2 item	Rp 252.307.553,00	1 Item	Rp 2.637.000,00	1 Item	Rp 199.654.950,00	-	-	-	2 item	Rp 202.291.950,00	32 Item	Rp 677.975.700,00	6,40	Rp 135.595.140,00	BPKAD	
11		Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	3 Item	Rp 1.529.570.000,00	3 item	Rp 1.788.463.550,00	3 item	Rp 390.505.750,00	-	Rp -	3 Item	Rp 250.828.250,00	-	-	-	3 item	Rp 250.828.250,00	3 item	Rp 2.039.291.800,00	100	Rp 407.858.360,00	BPKAD	
12		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1518 Kali	Rp 9.892.273.647,00	1036 Kali	Rp 7.408.700.334,00	210 Kali	Rp 824.760.307,00	82 Kali	Rp 366.406.284,00	39 Kali	Rp 108.819.000,00	-	-	-	121 Kali	Rp 475.225.284,00	1.157 Kali	Rp 7.883.925.618,00	231,40	Rp 1.576.785.123,60	BPKAD	
13		Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	44orang	Rp 4.707.017.497,00	44 Orang	Rp 2.773.191.372,00	44 orang	Rp 1.494.484.292,00	42 orang	Rp 268.389.553,00	42 orang	Rp 450.030.693,00	-	-	-	42 orang	Rp 718.420.246,00	42 orang	Rp 3.491.611.618,00	100	Rp 698.322.323,60	BPKAD	
14		Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	10 item	Rp 238.503.500,00	6 item	Rp 256.049.000,00	12 item	Rp 93.146.400,00	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	6 item	Rp 256.049.000,00	100	Rp 51.209.800,00	BPKAD		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome/Kegiatan (Output)	Target Renstra PD Tahun 2017- 2021(Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lata (2017 - 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang di revisi 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I,II,III,IV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang di revisi 2020		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	I	II	III	IV	K	RP	K	RP		K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8				12- 8+9+10+11		13- 8+13		14-13/5,100%		15		
II	Tersedianya Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan Kerja Badan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Rp 4.969.373.800,00	100%	Rp 4.752.159.107,00	100%	Rp 905.096.400,00	100%	Rp 147.295.000,00	100%	Rp343.261.100,00	-	-	100%	-	Rp 490.556.100,00	100%	Rp 5.242.715.207,00	Rp 1.048.543.041,40	
15		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	Rp 1.185.978.800,00	5 Gedung	Rp 1.591.563.157,00	5 gedung	Rp 192.642.900,00	1 Gedung	Rp 73.348.000,00	1 Gedung	Rp 54.192.600,00	-	-	-	2 Gedung	Rp 127.540.600,00	2 gedung	Rp 1.719.103.757,00	100 Rp 343.820.751,40	BPKAD
16		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	231 unit	Rp 2.022.075.000,00	137 Unit	Rp 1.927.242.750,00	59 Unit	Rp 374.813.500,00	20 Unit	Rp 73.947.000,00	39 Unit	Rp 163.157.000,00	-	-	-	59 unit	Rp 237.104.000,00	196 Unit	Rp 2.164.346.750,00	39,20 Rp 432.869.350,00	BPKAD
17		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	35 Jenis	Rp 1.751.320.000,00	21 Jenis	Rp 1.233.353.200,00	5 jenis	Rp 337.640.000,00	-	Rp -	2 Jenis	Rp 125.911.500,00	-	-	-	2 jenis	Rp 125.911.500,00	23 Jenis	Rp 1.359.264.700,00	4,60 Rp 271.852.940,00	BPKAD
III	Meningkatnya Disiplin dan Kinerja Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	Rp 76.500.000,00		Rp 76.500.000,00	100%	Rp 205.696.000,00	100%	Rp 119.416.000,00		Rp -	100%	-	100%	-	Rp 119.416.000,00	100%	Rp 119.416.000,00	Rp 23.883.200,00	
18		Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakatan Kerja Pegawai	160 stel	Rp 76.500.000,00	160 stel	Rp -	80 Stel waskat, 80 stel himan putih & 80 stel	Rp 205.696.000,00	80 Stel waskat dan 80 stel himan putih	Rp 119.416.000,00		Rp -	-	-	-	80 stel waskat dan 80 stel himan putih	Rp 119.416.000,00	320 Stel	Rp 119.416.000,00	64,00 Rp 23.883.200,00	
IV	Peningkatan Kompetensi Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	Rp 252.600.000,00	100%	Rp 371.498.100,00	100%	Rp 37.500.000,00	100%	Rp -		Rp -	100%	-	100%	-	Rp -	100%	Rp 371.498.100,00	Rp 74.299.620,00	
19		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	108 Orang	Rp 252.600.000,00	78 Orang	Rp 371.498.100,00	14 Orang	Rp 37.500.000,00		Rp -		Rp -	-	-	-		Rp -	78 Orang	Rp 371.498.100,00	15,60 Rp 74.299.620,00	BPKAD
VI	Tersedianya Data/Informasi Hasil Kinerja BPKAD	Program Penyebarhisaran Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya Informasi Pembangunan Daerah	100%	Rp 198.706.500,00	100%	Rp 448.280.500,00	100%	Rp 175.150.714,00	100%	Rp -	100%	Rp 138.727.600,00	100%	-	100%	-	Rp 138.727.600,00	100%	Rp 587.008.100,00	Rp 117.401.620,00	
20		Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Jenis	Rp 198.706.500,00	8 Jenis	Rp 448.280.500,00	3 Jenis	Rp 175.150.714,00	-	Rp -	3 Jenis	Rp 138.727.600,00	-	-	-	3 Jenis	Rp 138.727.600,00	12 Jenis	Rp 587.008.100,00	2,40 Rp 117.401.620,00	BPKAD
VII	Terlaksananya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan Daerah secara Optimal	100%	Rp 14.619.405.000,00	100%	Rp 10.694.998.648,00	100%	Rp 5.004.912.933,00	100%	Rp 550.829.137,00		Rp 687.954.100,00	100%	-	100%	-	Rp 1.238.783.237,00	100%	Rp 11.933.781.885,00	Rp 2.386.756.377,00	
21		Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen Harga barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang	5 Dokumen	Rp 691.500.000,00	3 Dokumen	Rp 327.293.583,00	1 Dokumen	Rp 87.145.157,00		Rp -		Rp -	-	-	-		Rp -	1 Dok	Rp 327.293.583,00	60% Rp 65.458.716,60	BPKAD
22		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Dokumen KUA	25 Dokumen	Rp 682.100.000,00	15 Dokumen	Rp 417.775.000,00	2 Dokumen	Rp 150.886.651,00		Rp -		Rp -	-	-	-		Rp -	15 Dokumen	Rp 417.775.000,00	300% Rp 83.555.000,00	BPKAD
23		Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen PPAS	25 Dokumen	Rp 642.800.000,00	15 Dokumen	Rp 418.000.000,00	5 Dokumen	Rp 136.900.000,00		Rp -		Rp -	-	-	-		Rp -	15 Dokumen	Rp 418.000.000,00	300% Rp 83.600.000,00	BPKAD
24		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Jumlah Dokumen KUA Perubahan	25 Dokumen	Rp 776.400.000,00	15 Dokumen	Rp 607.075.000,00	5 Dokumen	Rp 202.810.500,00		Rp -		Rp -	-	-	-		Rp -	15 Dokumen	Rp 607.075.000,00	300% Rp 121.415.000,00	BPKAD

No.	Sesura	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Rastera PD Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Rastera PD)		Realisasi Capaian Kinerja Rastera PD sampai dengan Rastera PD Tahun Lalu (2017 - 2019)		Target Kinerja dan Anggaran Rastera PD Tahun berjalan yang diwawakani 2020		Realisasi Kinerja Pada Trivium LULULUV				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rastera PD Tahun berjalan yang diwawakani (2020)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rastera PD s/d Tahun 2017-2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rastera Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rastera PD s/d Tahun 2020 (%)		Ush PD Peningkat ang Jawab	
				5		6		7		8				9-10-11-12		13-14-15		16-17-18-19%			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		K
25		Penyusunan Program Prioritas dan Plofan Anggaran Semester (PPAS) Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan APBD	25 Dokumen	Rp 777.450.000,00	15 Dokumen	Rp 413.875.000,00	2 Dokumen	Rp 203.020.000,00	-	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -	15 Dokumen	Rp 613.875.000,00	300%	Rp 122.775.000,00	BPKAD
26		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Raperda tentang APBD	10 Dokumen	Rp 2.446.700.000,00	6 Buku	Rp 1.943.032.340,00	20 Orang Kap. Sosialisasi & 2 Buku	Rp 263.730.000,00	20 Orang Kap. Sosialisasi	Rp 135.743.797,00	Rp 5.976.900,00	-	-	-	Rp 141.720.697,00	6 Buku	Rp 2.084.753.237,00	100	Rp 416.950.647,40	BPKAD
27		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	10 Buku	Rp 695.450.000,00	6 Buku	Rp 780.182.814,00	2 Buku	Rp 287.900.000,00	-	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -	6 Buku	Rp 780.182.814,00	100	Rp 156.036.562,80	BPKAD
28		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	25 Buku	Rp 2.359.900.000,00	15 Buku	Rp 1.446.976.500,00	5 Buku	Rp 776.188.900,00	-	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -	15 Buku	Rp 1.446.976.500,00	300%	Rp 289.395.300,00	BPKAD
29		Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	Rp 295.650.000,00	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	Rp 98.523.000,00	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	Rp 248.367.500,00	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	Rp 3.777.840,00	Rp -	-	-	-	Rp 3.777.840,00	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	Rp 102.300.840,00	100	Rp 20.460.168,00	BPKAD
30		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan	10 Buku	Rp 988.000.000,00	6 Buku	Rp 829.702.500,00	2 Buku	Rp 279.600.000,00	-	Rp -	1 Buku	Rp 189.450.000,00	-	-	Rp 189.450.000,00	7 Buku	Rp 1.019.152.500,00	140%	Rp 203.830.500,00	BPKAD
31		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu	50 Buku	Rp 911.650.000,00	30 Buku	Rp 581.721.600,00	7 dokumen	Rp 170.700.000,00	-	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -	30 Buku	Rp 581.721.600,00	600%	Rp 116.344.320,00	BPKAD
32		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	50 Buku	Rp 617.940.000,00	30 Buku	Rp 347.487.363,00	1 Dokumen	Rp 138.900.000,00	-	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -	30 Buku	Rp 347.487.363,00	600%	Rp 69.497.473,00	BPKAD
33		Penyusunan Pergeseran APBD	Jumlah Dokumen Pergeseran APBD	10 Buku	Rp 482.900.000,00	6 Buku	Rp 234.650.000,00	2 Buku	Rp 174.000.000,00	-	Rp -	2 Buku	Rp 162.900.000,00	-	-	Rp 162.900.000,00	8 Buku	Rp 417.550.000,00	160%	Rp 83.510.000,00	BPKAD
34		Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	Rp 54.740.000,00	29 OPD	Rp 35.112.450,00	29 OPD	Rp 17.950.000,00	-	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -	29 OPD	Rp 35.112.450,00	100%	Rp 7.022.490,00	BPKAD
35		Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran Perbulan	30 Berita Acara OPD	Rp 446.400.000,00	30 Berita Acara OPD	Rp 148.734.300,00	31 Berita Acara OPD	Rp 264.542.500,00	31 Berita Acara OPD	Rp 7.870.500,00	31 Berita Acara OPD	Rp 120.900.000,00	-	-	Rp 128.770.500,00	31 Berita Acara OPD	Rp 277.504.800,00	100%	Rp 55.500.960,00	BPKAD
36		Bimtek Kas Daerah	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	84 Orang	Rp 318.750.000,00	28 Orang	Rp 106.250.000,00	29 OPD	Rp 202.833.600,00	31 Orang	Rp 139.087.000,00	-	Rp 36.297.600,00	-	-	Rp 195.384.600,00	59 Orang	Rp 301.634.600,00	11,80	Rp 60.326.920,00	BPKAD
37		Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya	4 Dokumen	Rp 479.050.000,00	3 Dokumen	Rp 271.860.000,00	1 Dokumen	Rp 97.470.000,00	-	Rp -	Rp -	-	-	-	Rp -	3 Dokumen	Rp 271.860.000,00	0%	Rp 54.372.000,00	BPKAD
38		Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah Peserta Diklat	192 Orang	Rp 380.560.000,00	92 Orang	Rp 637.723.436,00	121 Orang	Rp 286.050.000,00	80 orang	Rp 208.000.000,00	52 Orang	Rp 33.029.600,00	-	-	Rp 263.029.600,00	224 Orang	Rp 900.753.036,00	44,80	Rp 180.150.607,20	BPKAD
39		Koordinasi FPK Perangkat Daerah dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah FPK OPD	29 OPD	Rp 67.700.000,00	29 OPD	Rp 54.200.000,00	29 OPD	Rp 52.700.000,00	-	Rp -	Rp -	-	-	Rp -	29 OPD	Rp 54.200.000,00	100	Rp 10.840.000,00	BPKAD	



BAB III

SASARAN DAN PRIORITAS RENJA TAHUN 2020

TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA OPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2020, maka Renja ini dengan maksud sebagai berikut :

- Tersedianya perumusan kebijakan teknis lingkup bidang Pengelolaan Keuangan
- Terwujudnya pengkoordinasian, pengendalian seluruh kegiatan pada unit kerja dinas dan hubungan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak lain.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2020, sama dengan tujuan disusunnya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang 2016 – 2021,yaitu berpedoman pada faktor-faktor kunci keberhasilan serta melihat keterkaitan dan implementasi dengan misi yang ada, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kinerja Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel.**
2. **Meningkatkan Pengendalian Daya Guna Aset, Prasarana dan Sarana Penunjang Pembangunan Daerah.**

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah.

BPKAD Kota Bontang untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta meningkatkan pengelolaan manajemen aset daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan pada aspek kesejahteraan, layanan publik dan peningkatan daya saing daerah.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang “ **Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim, Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat,** maka visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang adalah :



TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

Dari rumusan Visi tersebut di atas, dapat dijelaskan makna yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut :

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Akuntabel adalah pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Atau juga didefinisikan sebagai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka BPKAD Kota Bontang menetapkan *sasaran* dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Tercapainya tertib administrasi perkantoran;
- b. Peningkatan Disiplin Aparatur;
- c. Peningkatan Kompetensi Aparatur;
- d. Tersedianya data/informasi hasil pelaksanaan tupoksi BPKAD ;
- e. Terlaksananya penganggaran dan pengelolaan belanja daerah;
- f. Terlaksananya pengendalian pengelolaan Kas Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- g. Terlaksananya penganggaran dan pengelolaan belanja daerah;
- h. Tercapainya optimalisasi pendayagunaan kekayaan/aset daerah;
- i. Terlaksananya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sehubungan dengan itu Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang “**Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim, Berkebudayaan Industri Yang Bertumpu Pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat**“, dan sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021 yaitu **Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel**, maka program dan kegiatan Perubahan yang dirancang Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang tahun 2020 terdiri dari :

Program Penunjang :

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | : | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | | | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | | | 3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
| | | | 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| | | | 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| | | | 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |



**PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BONTANG TAHUN 2020**

- | | | | |
|---|---|----|---|
| | | 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | 9 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | | 11 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| | | 12 | Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| | | 13 | Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran |
| | | 14 | Penata kearsipan Kantor |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional |
| | | 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor |
| | | 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |
| | | 4 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |
| 4 | Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah | | |
| | | 1 | Publikasi Kegiatan Pembangunan |

Program Wajib :

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan | 1 | Penyusunan Standar Satuan Harga |
|---|--|---|---------------------------------|



Keuangan Daerah

- 2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 3 Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- 4 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan
- 5 Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD
- 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
- 8 Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD
- 9 Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD
- 10 Bimtek Kas Daerah
- 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- 12 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 13 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 14 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 15 Penyusunan Pergeseran APBD
- 16 Penyusunan Pelaporan Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Pemerintah Kota Bontang
- 17 Penetapan Bendaharawan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD



PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020

- | | | |
|---|----|---|
| | 18 | Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang belum ada Nilainya |
| | 19 | Pendampingan Dalam Rangka Menanggapi Audit Eksternal |
| | 20 | Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran |
| | 21 | Koordinasi PPK Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan |
| 2 | | Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah |
| | 1 | Penghapusan Barang Milik Daerah |
| | 2 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah |
| | 3 | Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang |
| | 4 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD) |
| | 5 | Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan diHapus |
| | 6 | Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrual |

Dari Tujuh program tersebut, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada tabel Rencana Perubahan Program Kegiatan RKPD Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang Tahun 2020.

Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapat dilihat pada table berikut dibawah ini :

PEMERINTAH KOTA BONTANG
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERUBAHAN OPD TAHUN 2020

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

No.	Kode Urusan/Progam/ Kegiatan	Nama Kegiatan	Murni		Perubahan		Pagu Anggaran			%	Ket
			Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	3.02.3.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran				5.439.675.303	7.109.503.359	1.669.828.056	522	
1	3.02.3.02.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12 bulan	Jumlah surat terkirim	12 bulan	8.689.300	10.779.300	Rp 2.090.000	24,05	-
2	3.02.3.02.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	370.800.000	396.540.000	Rp 25.740.000	6,94	
3	3.02.3.02.02.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan	47 Unit	Jumlah Kendaraan	47 Unit	40.792.500	40.792.500	Rp -	-	
4	3.02.3.02.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Kantor yang dipelihara	5 Unit	Jumlah Kantor yang dipelihara	5 Unit	369.340.000	459.340.000	Rp 90.000.000	24,37	
5	3.02.3.02.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	53 item	Jumlah alat tulis kantor	53 item	201.070.000	330.903.055,00	Rp 129.833.055	64,57	
6	3.02.3.02.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetakan	3 Jenis	Jumlah Jenis Penyediaan Pengadaan dan Cetakan	3 Jenis	466.064.730	556.064.730	Rp 90.000.000	19,31	
7	3.02.3.02.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	16 item	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor	16 item	95.556.600	125.556.600	Rp 30.000.000	31,40	
8	3.02.3.02.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9 Unit	740.320.000	1.326.320.000,00	Rp 586.000.000	79,15	
9	3.02.3.02.02.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	4 jenis bacaan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli selama 1 tahun	4 jenis bacaan	35.937.000	94.437.000	Rp 58.500.000	162,78	
10	3.02.3.02.02.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	2 item	Jumlah bahan logistik kantor yg tersedia	2 item	252.570.069	342.570.069	Rp 90.000.000	35,63	
11	3.02.3.02.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	3 item	Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kegiatan yang disediakan	3 item	421.195.750	626.195.750,00	Rp 205.000.000	48,67	
12	3.02.3.02.02.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	210 Kali	Penyelenggaraan rapat-rapat koordinai dan konsultasi keluar daerah	210 Kali	976.248.062	918.663.063,00	Rp (57.584.999)	(5,90)	
13	3.02.3.02.02.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	44 orang	Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	44 orang	1.357.734.292	1.777.984.292,00	Rp 420.250.000	30,95	
14	3.02.3.02.02.01.31	Penataan Kearsipan Kantor	Administrasi dan Dokumen	2 item	Administrasi dan Dokumen	2 item	103.357.000	103.357.000,00	Rp -	-	

No.	Kode Urusan/Progam/ Kegiatan	Nama Kegiatan	Murni		Perubahan		Pagu Anggaran			%	Ket
			Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	3.02.3.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.155.096.400	2.526.096.400	1.371.000.000	118,69	
15	3.02.3.02.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan yang disediakan	2 unit Rd 4, 5 unit Rd 2	-	716.000.000,00	Rp 716.000.000	100	
16	3.02.3.02.02.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 Gedung	392.642.900	822.642.900,00	Rp 430.000.000	109,51	
17	3.02.3.02.02.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	59 Unit	Jasa Service, Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas	59 Unit	424.813.500	559.813.500,00	Rp 135.000.000	31,78	
18	3.02.3.02.02.02.52	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 jenis	337.640.000	427.640.000,00	Rp 90.000.000	26,66	
III	3.02.3.02.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				Rp 205.696.000	Rp 205.696.000			
19	3.02.3.02.02.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Olah raga	80 stel waskat, hitam putih & olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Olah raga	80 stel waskat, hitam putih & olahraga	205.696.000	205.696.000			
IV	3.02.3.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				37.500.000	-	(37.500.000)		
20	3.02.3.02.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang ikut Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang			Rp 37.500.000	Rp -	Rp (37.500.000)	(100,00)	
V	3.02.3.02.02.10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi Pembangunan Daerah				275.150.714	325.150.714	50.000.000	18	
21	3.02.3.02.02.10.02	Publikasi Kegiatan Pembangunan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	Publikasi Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	275.150.714	325.150.714	Rp 50.000.000	18,17	
VI	3.02.3.02.02.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintah				5.150.912.933	6.585.530.780	1.434.617.847	192	
22	3.02.3.02.02.16.02	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen Harga barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	Jumlah dokumen Harga barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	87.145.157	51.060.000,00	(36.085.157)	-	-
23	3.02.3.02.02.16.05	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Jumlah Dokumen KUA	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA	2 Dokumen	150.886.651	215.300.000,00	64.413.349	3,31	
24	3.02.3.02.02.16.06	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen PPAS	5 Dokumen	Jumlah Dokumen PPAS	5 Dokumen	136.900.000	193.550.000,00	56.650.000	41,38	

No.	Kode Urusan/Progam/ Kegiatan	Nama Kegiatan	Murni		Perubahan		Pagu Anggaran			%	Ket
			Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	3.02.3.02.02.16.07	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan	Jumlah Dokumen KUA Perubahan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA Perubahan	2 Dokumen	232.810.500	202.810.500	(30.000.000)	(12,89)	
26	3.02.3.02.02.16.08	Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen PPAS Perubahan	2 Dokumen	233.020.000	203.020.000	(30.000.000)	(12,87)	
27	3.02.3.02.02.16.09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Dokumen Raperda APBD	20 orang ,2 Buku	Jumlah Dokumen Raperda APBD	20 orang ,2 Buku	889.730.000	1.452.219.655,00	562.489.655	63,22	
28	3.02.3.02.02.16.10	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Buku	Jumlah Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	2 Buku	287.900.000	472.050.000,00	184.150.000	63,96	
29	3.02.3.02.02.16.100	Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	30 Berita Acara OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	30 Berita Acara OPD	264.542.500	264.542.500	-	-	
30	3.02.3.02.02.16.101	Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan OPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan perbulan	8 BA OPD & 7 BA PUSKESMAS	248.367.500	274.467.500	26.100.000	10,51	
31	3.02.3.02.02.16.103	Bimtek Kas Daerah	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	29 OPD	Jumlah peserta Bimtek Kas Daerah	29 OPD	202.833.600	202.833.600	-	-	
32	3.02.3.02.02.16.11	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	5 Buku	Jumlah Dokumen Pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	5 Buku	776.388.900	880.938.900,00	104.550.000	32,47	
33	3.02.3.02.02.16.12	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan	2 Buku	Jumlah Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Perubahan	2 Buku	279.600.000	550.600.000,00	271.000.000	-	
34	3.02.3.02.02.16.13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu	7 Buku	Jumlah Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu	7 Buku	190.700.000	275.700.000	85.000.000	-	
35	3.02.3.02.02.16.14	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu	1 Dokumen	Jumlah Laporan Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tertib, akurat dan tepat waktu	1 Dokumen	158.900.000	153.900.000	(5.000.000)	(3,15)	

No.	Kode Urusan/Progam/ Kegiatan	Nama Kegiatan	Murni		Perubahan		Pagu Anggaran			%	Ket
			Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	3.02.3.02.02.16.25	Penyusunan Pergeseran APBD	Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pergeseran APBD	2 Buku	Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pergeseran APBD	2 Buku	174.000.000	174.000.000	-	-	-
37	3.02.3.02.02.16.29	Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang	Jumlah Dokumen Realisasi semester pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Realisasi semester pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota	1 Dokumen	117.470.000	117.470.000	-	-	-
38	3.02.3.02.02.16.32	Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah OPD bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	Jumlah OPD bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	29 OPD	17.950.000	17.950.000	-	-	-
39	3.02.3.02.02.16.59	Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya	Jumlah tanah dibawah jalanyang tercatat/bermilal	1 Dokumen	Jumlah tanah dibawah jalanyang tercatat/bermilal	1 Dokumen	60.568.125	60.568.125	-	-	-
40	3.02.3.02.02.16.64	Pendampingan Dalam Rangka Menghadapi Audit Eksternal	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi	29 OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi	29 OPD	202.450.000	258.800.000	56.350.000	-	-
42	3.02.3.02.02.16.92	Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Jumlah Peserta Diklat	125 Orang	Jumlah Peserta Diklat	125 Orang	386.050.000	407.550.000	21.500.000	5,57	-
43	3.02.3.02.02.16.97	Koordinasi PPK Perangkat Daerah Dalam Rangka Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah PPK OPD	29 OPD	Jumlah PPK OPD	29 OPD	52.700.000	156.200.000	103.500.000	-	-
VII	3.02.3.02.02.17	Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah	Ketersediaan data aset yang akurat	100%			499.023.750	657.043.750	158.020.000	31,67	-
44	3.02.3.02.02.17.23	Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan barang milik daerah secara maksimal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengelolaan barang milik daerah secara maksimal	1 Dokumen	39.680.000	39.680.000	-	-	-
45	3.02.3.02.02.17.24	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Jumlah dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	120.940.000	171.940.000	51.000.000	42,17	-
46	3.02.3.02.02.17.26	Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	Jumlah dokumen pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	Jumlah dokumen pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang	1 Dokumen	125.346.250	125.346.250	-	25,74	-

No.	Kode Urusan/Program/Kegiatan	Nama Kegiatan	Murni		Perubahan		Pagu Anggaran			%	Ket
			Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target	Murni	Perubahan	Bertambah/Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	3.02.3.02.02.17.28	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD dan RKPBMMD)	Jumlah dokumen Data rencana kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	29 OPD	Jumlah dokumen Data rencana kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	29 OPD	25.620.000	25.620.000	-	0,30	
48	3.02.3.02.02.17.35	Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan diHapus	Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah dokumen penilaian Barang Milik Daerah	1 Dokumen	113.187.500	113.187.500	-	-	-
49	3.02.3.02.02.17.54	Pendampingan Implementasi Aplikasi Penyusunan Aset Daerah Berbasis Akrua	Jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	Jumlah OPD yang didampingi	29 OPD	74.250.000	181.270.000	107.020.000	51,74	
							12.763.055.100	17.409.021.003	4.645.965.903	36,40	

Bontang, 14 Agustus 2020

Kepala Badan,





PERUBAHAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020

BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan Tahun 2020, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus tetap dijaga konsistensinya sesuai Tupoksi Badan melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bontang berkomitmen untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan yang akan dicapai dalam 5 Tahun ke depan sesuai waktu RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Dengan cara menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil Pembangunan Daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan Masyarakat Kota Bontang. Dalam penetapan Renja Perangkat Daerah terbuka sepenuhnya untuk dilakukan monitoring, evaluasi dan penilaian, dari seluruh tahapan yang akan dilalui, sehingga nantinya terjadi suatu proses penyempurnaan pelaksanaan maupun penilaiannya.

Bontang, Oktober 2020

Kepala Badan,


Drs. H. Amiluddin, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670927 199710 1 001